

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NOMOR 05 TENTANG AKUNTANSI PERSEDIAAN PERANANNYA DALAM MENINGKATKAN *INTERNAL CONTROL* PERSEDIAAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS

Dede Abdul Rozak
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis
rozakdede@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan Peranannya dalam Meningkatkan *Internal Control* Persediaan (Suatu studi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis). Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini meliputi: 1] Bagaimana penerapan akuntansi persediaan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis? 2] Bagaimana *internal control* atas pengadaan persediaan habis pakai dan racun hama pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis? 3] Bagaimana peranan penerapan akuntansi persediaan dalam meningkatkan *internal control* persediaan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis? Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif dengan teknik analisis deskriptif. Untuk menganalisis data yang diperoleh dilakukan analisis deskriptif mengenai penerapan PSAP No 05 dan *internal control* persediaan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis dengan teori yang baku, dan menganalisis penerapan PSAP No 05 dengan *internal control* persediaan sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah penerapan PSAP No 05 tentang akuntansi persediaan berperan dalam meningkatkan *internal control* persediaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang akuntansi persediaan telah diterapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis. Hal ini dilihat dari pengakuan, pengukuran dan penyajian yang sesuai dengan PSAP No 05. *Internal Control* persediaan telah dilakukan dengan baik, hal ini terlihat dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan telah dilakukan. Serta Penerapan PSAP No 05 tentang akuntansi persediaan berperan dalam meningkatkan *internal control* persediaan.

Kata Kunci: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 05, *Internal Control* Persediaan.

I. Pendahuluan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis merupakan bentuk organisasi sektor publik, dimana organisasi ini memiliki aktivitas ekonomi meskipun tujuan utamanya bukan untuk mencari laba. Tujuan utama organisasi ini adalah menciptakan *Good Governance* yang menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya ekonomi untuk kepentingan dan pelayanan masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan aktivitas pengendalian yang berfokus pada pelaksanaan yang efektif dan efisien sehingga dapat meminimalisir bahkan menutup kemungkinan adanya penyimpangan maupun hal-hal yang dapat merugikan organisasi dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Salah satu aktivitas ekonomi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis adalah pengadaan persediaan. Hampir setiap aktivitas instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan banyak membutuhkan persediaan. Persediaan dalam pemerintah dapat didefinisikan sebagai aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai lembaga publik yang berkewajiban menyediakan barang dan jasa publik, instansi pemerintah harus mengelola dan melakukan akuntansi persediaannya dengan baik. Untuk perlakuan persediaan pada lembaga pemerintahan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan guna memperoleh informasi akuntansi yang relevan mengenai persediaan. Perlakuan persediaan dengan acuan standar tersebut menggambarkan secara jelas proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas persediaan yang dimiliki.

Dalam pelaksanaannya, persediaan memerlukan suatu perhitungan dan perencanaan yang cermat agar jumlah persediaan tetap terkendali. Artinya jangan sampai persediaan tersebut kekurangan dan kelebihan karena itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak menguntungkan. Misalnya, kekurangan persediaan akan mengakibatkan tidak dapat dipenuhi permintaan sehingga kebutuhan tidak terpenuhi. Kelebihan persediaan juga berakibat buruk bagi lembaga, misalnya tingginya resiko penyimpangan. Persediaan sangat rentan terhadap kerusakan maupun penyimpangan. Oleh karena itu diperlukan pengendalian intern yang bertujuan melindungi persediaan tersebut dan juga agar informasi mengenai persediaan lebih dapat dipercaya. Pengendalian intern persediaan dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pengamanan fisik maupun administratif untuk mencegah terjadinya tindakan penyimpangan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab.Ciamis adalah sebuah lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat dalam kegiatan pertanian tanaman pangan. Dalam aktivitasnya terdapat 2 (dua) jenis persediaan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab.Ciamis, yaitu: persediaan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah atau persediaan habis pakai dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Jenis persediaan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis meliputi: alat tulis kantor dan alat kebersihan. Jenis persediaan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan adalah persediaan racun hama (pestisida). Oleh karena itu, penulis akan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan persediaan habis pakai yang digunakan dalam operasional pemerintah dan persediaan racun hama (pestisida) yang merupakan persediaan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan habis pakai

yang penulis maksud disini adalah perlengkapan yang dapat menunjang kegiatan operasional yaitu alat tulis kantor dan alat kebersihan. Keputusan ini penulis ambil karena tujuan utama aktivitas persediaan pada dinas ini adalah pelayanan masyarakat dalam bidang pertanian tanaman pangan yang optimal, oleh karena itu dalam kegiatan operasionalnya dibutuhkan banyak perlengkapan untuk menunjang kelancaran kegiatan. Racun hama (pestisida) merupakan salah satu persediaan yang harus dilakukan dinas ini demi terpenuhinya kebutuhan petani dan tercapainya program dinas untuk tanaman pangan bebas hama dan hasil pertanian yang optimal.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis dalam perlakuan persediaan belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi pemerintahan no 05, namun paling tidak dapat memastikan bahwa elemen data mengenai aktivitas ekonomi dalam hal ini aktivitas perlakuan atas persediaan dapat tersaji dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pada instansi ini. Hal yang menjadi persoalan instansi ini belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi pemerintah dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengikuti standar akuntansi, selain itu disesuaikan dengan cakupan kerja instansi karena cakupan kerja instansi ini tidak sebesar instansi yang berada di pusat.

Terdapat beberapa bagian berkaitan dengan persediaan habis pakai dan racun hama (pestisida), yaitu: bagian gudang, pembelian, dan akuntansi. Dalam teori yang terdapat dalam buku-buku referensi, terdapat pemisahan tanggung jawab masing-masing bagian secara tegas yang bertujuan untuk mencegah dan agar dapat dilakukannya deteksi segera atas kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada seseorang. Namun pada kenyataannya, dalam pengelolaan persediaan habis pakai dan racun hama (pestisida) pemisahan fungsi belum dilaksanakan dengan semestinya. Bagian pembelian selain menjalankan tanggung jawab bagian pembelian juga menjalankan tanggung jawab bagian penyimpanan.

II. Metode

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penyelidikan yang bertujuan pada pemecahan-pemecahan yang ada pada masa sekarang, pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu, karena itulah maka terjadi sebuah

penyelidikan deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu lalu mengambil bentuk studi komparatif mengukur suatu bentuk dimensi seperti dalam berbagai bentuk studi komparatif, angket test, interview dan lain-lain atau mengadakan klasifikasi ataupun mengadakan penilaian penetapan standar (normatif) menetapkan hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lainnya. Operasionalisasi kedua konsep tersebut akan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator
Akuntansi Persediaan PSAP 05 (X)	Merupakan proses dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas persediaan. (SAP, Lamp I PSAP 05:3)	1. Pengakuan 2. Pengukuran 3. Penyajian
<i>Internal Control</i> Persediaan (Y)	Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP 60 Tahun 2008:2)	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan pengendalian intern

Adapun sumber data penelitian ini adalah dengan melakukan:

1. Penelitian Kepustakaan

Dalam hal ini sumber data yang diperoleh dari buku-buku literatur, catatan kuliah yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Dalam hal ini sumber data diperoleh dengan mengadakan penelitian langsung pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta mengadakan wawancara langsung kepada yang bersangkutan.

Untuk memperoleh data tersebut, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data:

1. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas yang berhubungan akuntansi persediaan dan *internal control* persediaan racun hama (pestisida) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab.Ciamis

2. Wawancara

Cara ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak-pihak tertentu dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, yang mempunyai wewenang untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Dokumentasi

Cara ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Data yang penulis peroleh melalui teknik-teknik pengumpulan data diatas merupakan data yang masih memerlukan penganalisaan lebih lanjut. Langkah-langkah yang penulis ambil untuk menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis secara deskriptif tentang akuntansi persediaan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis yaitu dengan menganalisa penerapan standar akuntansi nomor 05 pada penyajian laporan keuangan dan cara perlakuan atas persediaan , sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah akuntansi persediaan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis telah sesuai atau belum dengan akuntansi persediaan pada standar akuntansi pemerintahan.
2. Menganalisis secara deskriptif tentang *internal control* persediaan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis yaitu dengan menganalisa pelaksanaan unsur-unsur pengendalian intern, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah penerapan *internal control* persediaan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis telah sesuai atau tidak dengan *internal control* persediaan berdasarkan teori.
3. Menganalisis secara deskriptif akuntansi persediaan berdasarkan PSAP No 05 dengan *internal control* persediaan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis yaitu dengan cara membandingkan hasil analisis pertama dengan analisis kedua yaitu mengenai penerapan standar akuntansi persediaan nomor 05 merupakan bentuk penilaian risiko guna meningkatkan pengendalian intern, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah penerapan PSAP No 05 tentang akuntansi persediaan berperan dalam meningkatkan *internal control* persediaan.

III. Hasil

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 05 diterapkan dalam perlakuan persediaan. Standar ini mengatur perlakuan akuntansi persediaan pemerintah pusat dan daerah yang meliputi: Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian.

1. Pengakuan

Menurut Dedi Ismatullah (2011:41) pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi". Berdasarkan PSAP Nomor 05 bahwa persediaan diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang untuk menghitung jumlah (kuantitas) suatu persediaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian penulis dapat diketahui bahwa pengakuan persediaan pada standar akuntansi persediaan yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan nomor 05. Hal tersebut ditandai dengan pengakuannya, yaitu sebagai berikut.

Dalam pengakuannya, barang diakui sebagai persediaan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis yaitu ketika barang yang diterima merupakan barang yang diperlukan dan memiliki manfaat dalam menunjang kegiatan instansi ini. Penentuan kebutuhan barang melalui proses merumuskan rincian kebutuhan barang dengan menghubungkan pengadaan barang yang telah terealisasi dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan pengadaan barang. Setelah barang persediaan diterima kemudian diperiksa dan dihitung kembali apakah banyaknya barang yang diterima telah sesuai dengan yang ada dalam faktur. Suatu contoh faktur yang diperoleh adalah ketika bagian pembelian menyerahkan barang berikut dengan melaporkan faktur pembelian, yaitu mengenai pengadaan persediaan habis pakai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis, yaitu : 43 rim Kertas F4 70gram, 20 rim Kertas A4 70gram, 4 rim Kertas A3, 30 rol Kertas fax, 18 pak Map biasa, 17 pak Map snel, 65 bh Map order, 50 bh Map plastic, 3 bh Tinta bak stempel, 15 ds Tinta refill hitam, 15 btl Tinta refill hitam, 6 ds Tinta refill warna, 6 bh Tinta mesin tik, 1 pak Karbon, 28 bh Spidol. Sama halnya dengan persediaan racun hama yaitu setelah barang persediaan diterima kemudian diperiksa dan dihitung kembali apakah banyaknya barang yang diterima telah sesuai dengan yang ada dalam faktur.

Setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap fisik persediaan habis pakai dan persediaan racun hama, baik itu pemeriksaan jenis dan kuantitasnya lalu dilakukannya pencatatan atas barang persediaan yaitu dicatat dalam buku persediaan.

2. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar: biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

a. Biaya Perolehan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan sejenis lainnya akan mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

b. Biaya Standar

Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

c. Nilai Wajar

Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 “Untuk persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Menurut PSAP (2010:3 PSAP 05 Lamp 1) bahwa “Persediaan terakhir dapat dinilai dengan menggunakan metode sistematis seperti: metode *First-In, First-Out* (FIFO).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian penulis, dapat diketahui bahwa pengukuran persediaan pada standar akuntansi persediaan yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan nomor 05. Hal tersebut ditandai dengan pengukuran terhadap nilai persediaannya, yaitu sebagai berikut.

Persediaan yang dimiliki Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis adalah persediaan habis pakai yang meliputi alat tulis kantor, alat kebersihan dan persediaan racun hama (pestisida) yang diperoleh dengan dua cara yaitu dengan pembelian dan donasi.

Persediaan yang diperoleh dengan cara pembelian yaitu persediaan habis pakai diantaranya alat tulis kantor dan alat kebersihan. Persediaan yang diperoleh dari donasi yaitu persediaan racun hama (pestisida).

Nilai persediaan jika diperoleh dengan pembelian yaitu dengan menghitung biaya perolehannya yang meliputi harga pembelian dan biaya pengangkutan, tetapi dalam pembelian dengan jumlah yang banyak potongan harga saat pembelian tidak dibuat terpisah, hanya saja dengan pembelian yang banyak harga pembelian sedikit lebih rendah sehingga diperoleh nilai persediaannya. Berdasarkan faktur mengenai pembelian persediaan habis pakai berupa ATK akan diperoleh nilai persediaannya, dengan pembelian sebagai berikut:

43 rim Kertas F4 70gram	x	Rp 35.500	= Rp 1.483.500
20 rim Kertas A4 70gram	x	Rp 31.000	= Rp 620.000
4 rim Kertas A3	x	Rp 62.500	= Rp 250.000
30 rol Kertas fax	x	Rp 12.000	= Rp 360.000
18 pak Map biasa	x	Rp 17.000	= Rp 306.000
17 pak Map snel	x	Rp 18.000	= Rp 306.000
65 bh Map order	x	Rp 11.000	= Rp 715.000
50 bh Map plastic	x	Rp 5.000	= Rp 250.000
3 bh Tinta bak stempel	x	Rp 7.050	= Rp 21.150
15 ds Tinta refill hitam	x	Rp 20.000	= Rp 300.000
15 btl Tinta refill hitam	x	Rp 35.000	= Rp 525.000
6 ds Tinta refill warna	x	Rp 22.500	= Rp 135.000
6 bh Tinta mesin tik	x	Rp 8.500	= Rp 51.000
1 pak Karbon	x	Rp 37.000	= Rp 37.000
28 bh Spidol	x	Rp 16.000	= Rp 168.000
Ongkos angkut		Rp 15.000	
Nilai persediaan		Rp 6.542.650	

Nilai persediaan yang diperoleh dari donasi dinilai dengan nilai wajar yaitu dengan cara menyesuaikan dengan harga pasar sehingga diperoleh nilai persediaannya. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis memperoleh persediaan racun hama donasi pada tahun 2012 sebanyak 400 kg. Oleh karena itu, untuk menilai persediaan racun hama pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis menilainya dengan harga yang

berlaku di pasar yang saat itu harga berlaku umum Rp 15.000/kg, jadi nilai persediaan atas racun hama adalah Rp 6.000.000.

Persediaan yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis secara keseluruhan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak menggunakan metode *First In First Out* dalam melakukan penentuan harga jual barang persediaan, karena tidak ada persediaan yang digunakan untuk dijual kepada masyarakat. Dalam PSAP No 05 menyatakan bahwa metode *First In First Out* digunakan dalam menentukan harga jual, akan tetapi dalam melaksanakan pengukuran nilai persediaan untuk disajikan dalam laporan adalah dinilai dengan harga persediaan yang terakhir diperoleh. Oleh karena itu, metode *First in first out* diterapkan meskipun Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis tidak memiliki barang persediaan untuk dijual kepada masyarakat.

3. Penyajian

Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar pada neraca pemerintah berdasarkan harga perolehan terakhir jika persediaan diperoleh dengan pembelian, sebesar biaya standar yang dikeluarkan jika persediaan diproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian penulis dapat diketahui bahwa penyajian atas informasi persediaan pada standar akuntansi persediaan yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan nomor 05. Hal tersebut ditandai dengan penyajian atas informasinya, yaitu sebagai berikut.

Informasi mengenai persediaan disajikan dalam bentuk laporan yang dilaporkan secara berkala yaitu setiap satu bulan, yang disajikan atas inventarisasi fisik dan dilaporkan tentang berapa banyak persediaan yang direncanakan dan berapa banyak yang terealisasi pada setiap bulannya. Pada periode akuntansi yaitu pada semester pertama pada bulan Juni dan semester kedua pada bulan Desember persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan kemudian dilaporkan dalam neraca yang dibuat setiap satu semester atau disebut dengan neraca komparatif dan neraca tahunan yang dibuat oleh bagian keuangan, karena bagian keuangan memiliki wewenang dalam pembuatan laporan dan akan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis. Pada neraca komparatif ataupun

neraca tahunan dinas, persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar setelah akun kas yang diberi kode akuntansi 1.1.5.01.00 untuk persediaan habis pakai dan 1.1.5.02.00 untuk persediaan yang akan disalurkan dan disajikan berdasarkan harga perolehan terakhir jika persediaan diperoleh dengan pembelian, dan sebesar nilai wajar jika diperoleh dengan cara donasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat diketahui bahwa standar akuntansi yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis dalam perlakuan atas barang persediaan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan nomor 05. Hal tersebut ditandai dengan pengakuan, pengukuran dan penyajian informasi atas persediaan yang diatur dalam standar akuntansi persediaan nomor 05 telah diterapkan. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa standar akuntansi pemerintahan nomor 05 yang mengatur tentang akuntansi persediaan telah diterapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis.

Sistem pengendalian intern pemerintah dirancang dan digunakan untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan pengendalian intern dapat dipenuhi. Oleh karena itu, pengendalian intern memiliki unsur- unsur yang saling terkait, unsur-unsur pengendalian intern meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Penerapan unsur sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Pengendalian intern persediaan mempunyai tujuan untuk menjamin keamanan, kepatuhan dan ketelitian atas aktivitas pengadaan persediaan, baik itu aktivitas fisik maupun administratif dengan bentuk catatan akuntansi persediaan. Oleh karena itu, pengendalian intern persediaan perlu dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis untuk mencapai tujuan tersebut. Pengendalian intern persediaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: (a) penegakan integritas dan nilai etika, (b) komitmen terhadap kompetensi, (c) kepemimpinan yang kondusif, (d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, (e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, (f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia, (g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan (h) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Dilihat dari lingkungan pengendalian, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan berikut dengan pendelegasian wewenangnya dan memperlihatkan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis, sehingga setiap bagian dan aparatur instansi ini secara jelas mengetahui tugas dan kepada siapa laporan tugas dilaporkan. Termasuk dalam hal persediaan yang dikelola oleh panitia pengadaan barang dan jasa dibawah sekretariat dan subag kepegawaian umum. Pimpinan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis melakukan penegakan integritas dan nilai etika dengan: menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku, menegakkan tindakan disiplin atas prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku dan memberikan penghargaan untuk meningkatkan penegakan integritas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika. Selain itu komitmen terhadap kompetensi dilakukan dengan: menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi dan menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya. Dengan adanya aturan, prosedur dan memberikan penghargaan bertujuan agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik dan kompetensi aparatur dapat meningkat. Selain itu, hubungan kerja dengan instansi terkait yaitu dengan kepala daerah pemerintah daerah kabupaten ciamis dan kementerian pertanian harus selalu dijaga dengan baik.

Dari hasil wawancara dan penelitian penulis diatas, bahwa dengan diterapkannya unsur pengendalian intern pada lingkungan pengendalian maka dapat terpeliharanya lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis yang kondusif.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah harus melakukan penilaian risiko guna mengidentifikasi dan menganalisis terhadap risiko yang relevan. Diantaranya: (a) peraturan perundang-undangan baru, (b) perkembangan teknologi, (c) bencana alam, dan(d) gangguan keamanan.

Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi

mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Risiko yang dianalisis meliputi: adanya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan.

Penilaian resiko atas pengadaan persediaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis dengan melakukan penjagaan atas fisik persediaan dengan cara menjaga dan menyimpan fisik barang ditempat yang aman. Adanya peraturan pemerintah baru, salah satunya mengenai standar akuntansi pemerintah merupakan risiko yang telah teridentifikasi, pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis menyadari jika laporan mengenai persediaan tidak tersaji berdasarkan standar akuntansi maka akan terjadi salah saji didalam laporannya. Cara yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis dalam menghindari risiko tersebut yang dapat berakibat pada kesalahan pada penyajian laporan keuangan yaitu diadakannya pelatihan untuk aparatur khususnya bagi panitia pengadaan pengurus barang dan bagian keuangan yang perlu diberi pelatihan dari pihak luar instansi yang ahli dalam cara penerapan standar akuntansi dan jika adanya peraturan perundangan yang baru mengenai standar akuntansi pemerintahan.

Dari hasil wawancara dan penelitian dapat diketahui bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis melaksanakan penilaian risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian terdiri atas: (a) reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, (b) pembinaan sumber daya manusia, (c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, (d) pengendalian fisik atas asset, (e) penetapan dan reviu atas ukuran kinerja, (f) pemisahan fungsi, (g) otorisasi atas transaksi (h) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, (i) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, (j) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, (k) dokumentasi yang baik atas transaksi dan kejadian penting.

Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis dapat menghindari resiko yang terjadi dengan mengotorisasi setiap transaksi dan membuat prosedur dalam pengelolaan persediaan, diantaranya dalam penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang.

a. Penerimaan

Aktivitas pengendalian atas penerimaan barang persediaan yang diperoleh melalui pembelian atau hibah harus tertib dalam administrasi, meliputi:

- 1) Surat perjanjian/kontrak saat penerimaan barang harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Barang yang diterima harus disertai faktur yang merupakan dokumen yang jelas menyatakan macam/jenis, banyak, harga dan spesifikasi barang.
- 3) Dibuat surat penerimaan sementara dan diberi catatan barang belum diperiksa oleh panitia pengadaan apabila barang yang telah diterima belum diperiksa panitia.
- 4) Barang diterima setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan dinyatakan sah apabila berita acara pemeriksaan barang telah ditandatangani oleh panitia pengadaan
- 5) Barang yang diterima dimasukkan kedalam buku persediaan

b. Penyimpanan

Aktivitas penyimpanan barang persediaan yaitu:

- 1) Menyelenggarakan administrasi penyimpanan/pegudangan atas barang persediaan yang ada dalam gudang.
- 2) Melakukan *stock opname* secara berkala ataupun insidental terhadap barang persediaan yang ada didalam gudang untuk selanjutnya dibuatkan berita acara perhitungan barang persediaan.
- 3) Memberikan tanggungjawab penuh atas penyimpanan persediaan.

c. Penyaluran

Diselenggarakan administrasi penyaluran dengan tertib dan rapi, diantaranya:

- 1) Bukti pengambilan barang dari gudang yaitu tanda pengeluaran barang
- 2) Berita acara serah terima dari gudang
- 3) Surat perintah pengeluaran/penyaluran barang.

Prosedur yang ditetapkan sebagai kegiatan pengendalian yang diberlakukan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis khususnya untuk panitia pengadaan barang tidak terlepas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aktivitas dalam pengelolaan persediaan dilakukan dengan tertib administrasi maksudnya dengan melampirkan atau menggunakan dokumen-

dokumen yang sah, bukti-bukti transaksi dan juga dicatat kedalam buku persediaan. Cara yang digunakan oleh panitia pengelolaan barang dalam pengolahan data tersebut guna menyusun informasi yaitu dengan cara pencatatan manual, dikumpulkan lalu dibuat dalam bentuk laporan dengan menggunakan teknologi komputer agar laporan mengenai informasi persediaan dapat tersaji secara akurat, relevan dan tepat waktu. Setelah melakukan pencatatan selanjutnya catatan, bukti transaksi dan kejadian penting perlu didokumentasikan dengan baik agar pada saat diperlukan kembali dapat dengan mudah dan cepat diperoleh. Reviu atas kinerja dalam hubungannya dengan pengendalian intern persediaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis adalah untuk menilai kembali semua aktivitas, prosedur dan perlakuan atas persediaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis sudah sesuai sehingga dapat terhindar dari risiko yang mungkin akan terjadi.

d. Informasi dan Komunikasi

Untuk menyelenggarakan informasi yang baik harus mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Selain itu, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif dilakukan dengan cara: (a) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan (b) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis diharuskan memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang berhubungan dengan peristiwa dan transaksi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada pimpinan instansi dan lainnya di seluruh instansi pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk laporan serta kerangka waktu tepat, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab operasional. Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis melalui panitia pengelolaan barang dalam menyajikan informasi mengenai persediaan disampaikan kepada bagian keuangan untuk disusun dalam bentuk neraca dan disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bagian dari pelaporan sehubungan dengan pencapaian kinerja operasi pengelolaan persediaan. Pada aktivitas instansi terjalin komunikasi yang baik dan efektif tidak hanya bergantung pada komunikasi telepon dan internet antar bagian didalamnya akan tetapi melalui komunikasi secara langsung karena posisi ruangan antar bagian saling berdekatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis telah sesuai dan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut terlihat dengan adanya komunikasi informasi dalam bentuk laporan yang merupakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan.

e. Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern pemerintah dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri dan reviu. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Pemantauan merupakan hal yang paling penting untuk menilai dan mengawasi pengelolaan barang persediaan. Pemantauan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yaitu oleh inspektorat kabupaten. Jika ada barang persediaan yang diperoleh dari donasi pemerintah pusat ada pihak yang memantau apakah barang persediaan telah diterima sesuai dengan yang dilaporkan, sama halnya dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis jika menyalurkan barang persediaan kepada masyarakat, dikerahkan tim untuk memantau jalannya penyaluran barang persediaan apakah telah sesuai dengan program atau permintaan dari yang diajukan masyarakat.

Dari hasil penelitian penulis diatas, dapat diketahui bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis telah melakukan pemantauan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengendalian intern persediaan yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis sudah baik hal ini terlihat adanya unsur-unsur pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Standar akuntansi pemerintahan nomor 05 mengatur perlakuan akuntansi persediaan pemerintah pusat dan daerah yang meliputi: Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian sehingga instansi dalam perlakuan persediaan, mengolah atau menyusun informasi mengenai persediaan dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan

penerapan standar akuntansi nomor 05 tentang akuntansi persediaan dapat meningkatkan pengendalian intern persediaan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan penulis, terlihat adanya peranan penerapan PSAP nomor 05 dalam meningkatkan pengendalian intern, yaitu pada tiga indikator akuntansi persediaan yang meliputi: pengakuan, pengukuran dan penyajian yang memiliki peranan dengan pengendalian intern persediaan dengan indikatornya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Dalam pengakuan persediaan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis adanya kegiatan inventarisasi fisik dan pencatatan atas barang persediaan yang diterima, hal tersebut menunjukkan adanya kegiatan pengendalian yang merupakan unsur dan indikator dalam pengendalian intern persediaan

Dalam pengukuran persediaan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis diukur berdasarkan nilai perolehannya yang diperoleh dengan dua cara: cara pembelian dan donasi/hibah dari instansi pemerintah terkait. Aktivitas pengukuran barang persediaan menunjukkan adanya kegiatan pengendalian dan penilaian risiko salah saji manakala barang persediaan tidak diukur berdasarkan perolehannya.

Penyajian informasi persediaan yang disajikan dalam neraca hanya dibuat oleh bagian keuangan, karena bagian keuangan memiliki wewenang dalam pembuatan laporan. Pada neraca, persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar yang dilengkapi dengan kode akuntansinya. Hal tersebut merupakan suatu penilaian risiko akan kesalahan penyajian dan sebagai bukti kepatuhan atas standar yang diberlakukan, penyajian informasi persediaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang menunjukkan adanya lingkungan pengendalian berupa pemisahan tugas dan tanggung jawab. Penyajian yang akurat dan relevan merupakan langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk mengkomunikasikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan penulis didukung dengan pernyataan Sukrisno Agoes (2012:101) menjelaskan bahwa risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan: perubahan lingkungan, personel baru, sistem informasi baru, teknologi baru, operasi luar negeri, aktivitas baru dan standar akuntansi baru.

Selain itu, Bambang Karyadi (2000:115) mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern persediaan meliputi struktur organisasi semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi

untuk melindungi harta, ketelitian, serta seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya untuk mendorong ditaatinya kebijakan yang telah diterapkan tentang persediaan barang.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa standar akuntansi mengenai persediaan yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis berperan dalam meningkatkan pengendalian intern persediaan karena penerapan standar akuntansi merupakan hal yang dapat mengurangi risiko dalam pengendalian intern persediaan.

IV. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan Peranannya dalam Meningkatkan *Internal Control* Persediaan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang akuntansi persediaan telah diterapkan dengan baik oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis, hal ini terlihat dengan pengakuan, pengukuran dan penyajian informasi atas persediaan telah dilakukan dengan baik. Informasi mengenai persediaan dibuat dan disajikan dalam bentuk laporan yang merupakan bentuk pertanggung jawaban dalam perlakuan atas barang persediaan.
2. Pengendalian intern persediaan yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis sudah baik hal ini terlihat adanya unsur-unsur pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis.
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang akuntansi persediaan yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis berperan positif dalam meningkatkan pengendalian intern persediaan karena penerapan standar akuntansi merupakan hal yang dapat mengurangi risiko dalam pengendalian intern persediaan.

Daftar Pustaka

- Agoes, S. 2012. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Apip, M & Akbar, DS. 2013. *Diktat Pengantar Akuntansi II*. Ciamis: Universitas Galuh.
- Baridwan, Z. 2000. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE.
- _____. 2001. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE.

- Hamizar, NM. 2008. *Akuntansi intermediate*. Jakarta: CV Fajar.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jusup, AH. 2005. *Dasar-Dasar akuntansi*. Yogyakarta: BPSTIE.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2007. *Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Niswonger, W & Reeve, F. 2006. *Prinsip-Prinsip Akuntansi*. Dialihbahasakan oleh Sirait, A dan Gunawan, H. Jakarta: Erlangga.
- Nordiawan, D dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahmat. 2011. *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Tuanakotta, TM. 2001. *Petunjuk Pemeriksaan Akuntan Publik*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.